

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- A. Hamid S Attamimi, Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Huukum Tata Pengaturan), Jakarta : Fakultas Hukum UI, 1993.
- Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Jakarta : Kencana, 2005.
- Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum, Ed. II; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008
- Andi Pangerang Moenta, dan Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: RajaGrafindo Persada : 2018.
- Amiroedin Syarif, Perundang-undangan (Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya), Bandung : Rineka Cipta, 1997.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik Teknik Teoritisasi Data, ter.Muhammad Shodiq dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Arief Sidharta Bernard, 1999, “Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia”. Mandar Madju, Bandung
- Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, Hotma P. Sibuea, Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Asshidiqie, Jimly. Green Contitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Astawa, I Gde Pantja. Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Bandung: Alumni, 2009.
- Astawa, I Gde Pantja dan Suprin Na'a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Bandung: Armico, 2008.
- Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta, IND-HILL.Co, 1992
- Bagir Manan, Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1997.
- Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia (Alumni, Bandung, 1997)
- Bagir Manan, Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, Armico, 1987
- Bambang Antariksa, Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ketatanegaran Indonesia, Deliberatif, Volume 1 Nomor 1, Juli 2017.
- B. Arief Sidharta, Makalah Seminar: Filsafat Hukum Pancasila, Universitas Pancasila, Jakarta, 2006.
- Burkhardt Krems seperti dikutip A Hamid S Attamimi dalam Peranan

- Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990)
- B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008)
- Ekatjahjana, Widodo. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunannya, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Halim, Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manualnya): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Hamidi, Jazim et.al. Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Prestasi Jakarta: Pustaka Publisher, 2008
- Handoyo, B. Hestu Cipto. Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008.
- Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, (Jakarta: Erlangga, 2010),
- Hotma P. Sibuea dan Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, Depok : Rajagrafindo Persada : 2020.
- I Dewa Gede, Asas-asas Pembentukan Produk Hukum, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, perihal Undang-undang, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Buana Ilmu,
- Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-6, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2012.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).
- Moh Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan Bagian 1, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik Penyusunan), Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan I Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Ed. Revisi. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020
- Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Total Media, 2012
- Nukila Evanty, Nurul Ghufron, Paham Peraturan Daerah (Perda) berspektif HAM (Hak Asasi Manusia), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2014
- Montesquieu, *The Spirit Of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik (Terjemahan)*, Bandung: Nusamedia, 2007)
- M. Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, (Bandung:

- Mandar Maju, 2009
- Natabaya HAS, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, 2008. Jakarta. Konstitusi Press dana Tatanusa
- Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta : 2020
- Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali), Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012.
- Rio Admiral Parikesit, *Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan* Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 18 No. 4 - Desember 2021
- Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Ismail Navianto, Lucky Endrawati, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014,
- Saifudin, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Sri Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional (edisi Ketiga), Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984.
- Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Sjahan Basah, *Perlindungan Hukum atas Tindak Pidana Administrasi Negara*, Bandung : Alumni, 1992, hlm.2
- Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Total Media, 2012,
- R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Ed. Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ridwan HR, salah satu fungsi asas legalitas adalah sebagai dasar legitimasi tindakan pemerintah. (Ridwan HR)
- Padmo Wahyono, Ilmu Negara (Indo-Hill Co., Jakarta, 1999),
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Bahan P.T.H.I: Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Balai Pustaka, 1982, hal. 990
- Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia (Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian), Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

## B. UNDANG-UNDANG :

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## C. JURNAL :

- A. Hamid S. Attamimi, 1982, "Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan", BPHN, Himpunan Bahan Penataran Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan Tanggal 1 s/d 20 Juni 1981, Diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta,
- Ali Marwan HSB, De Jure, Mengkritisi pemberlakuan Teori Fiksi Hukum, Jurnal Volume 16 Nomor 3, Jakarta, 2016.
- Andi Bau Inggit AR, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Jurnal Restorative Justice, Vol. 3, Nomor 1, Mei 2019;
- Asrul Ibrahim. *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Konstelasi dan Kontroversi dalam Monograf Dekonstruksi Perundang-undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*
- VCRAC Crabbe, Legislative Drafting, (London: Cavendish Publishing Limited, 1994), hlm. 4. 2. 0 database/artikel/htn/dasar2.pdf. diakses 28 Februari 2020
- Imer B. Flores, "Legisprudence, The Role and Rationality of Legislators – Vis a Vis Judges- Towards The Realization of Justice", Mexican Law Review, New Series Volume 1, Number 2, 2009.
- Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005
- Muhtadi, Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum "Way Rilau" Kota Bandar Lampung), Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013;

- Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Ismail Navianto, Lucky Endrawati, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
- Rio Admiral Parikesit, *Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan* Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 18 No. 4 - Desember 2021
- Suhartono, harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran belanja Negara (disertasi : fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
- Saiful Bahri, “Dasar-Dasar Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”, hlm.1. <http://www.legalitas.org/>
- Philipus M.Hadjon, Analisis terhadap UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (makalah), Seminar Hukum Nasional “Implementasi UU No 10 Tahun 2004 dalam Legislasi Daerah Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004”, Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 21 Mei 2005

#### D. WEBSITE :

- <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/05/20/perbedaan-hukum-formil-dan-materil-berdasarkan-sumber-hukumnya/> Penulis : Joni Kasim  
Editor : Nora Listiawati Publisher : Radhes Langgeng
- <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/848>
- <https://onsearch.id/Record/IOS1683.article-848?widget=1>
- <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806>
- <https://www.uui.ac.id/pembaharuan-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memaknai-harmonisasi-peraturan-di-indonesia-lt629d92ccd8920>